



## **PENGUMUMAN**

Nomor: 20 /PN.01.02

Tentang

**Pengadaan Jasa Tenaga Ahli  
Penyelenggaraan Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)  
Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026**

Sehubungan dengan Aktivitas Penyelenggaraan Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) pada Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2026, dengan ini diberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi dengan formasi kebutuhan Tenaga Ahli:

- a. Tenaga Ahli Pengelola Website SDGs sebanyak 1 (Satu) orang dengan pengalaman kerja minimum 3 (Tiga) tahun
- b. Tenaga Ahli Pengolah Data SDGs sebanyak 1 (Satu) orang dengan pengalaman kerja minimum 3 (Tiga) tahun.

### **I. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS**

1. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
2. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
3. Formulir Isian Kualifikasi.
4. Fotokopi Identitas Kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor.
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang menyatakan bahwa:
  - a) Tidak pernah/sedang/dalam proses dikenakan sanksi daftar hitam.

- b) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak terkait.
  - c) Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana.
  - d) Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara atau Calon Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
  - e) Bersedia ditugaskan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
  - f) Tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia/terdapat perubahan anggaran dalam DPA Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026/proses pengadaan dibatalkan.
  - g) Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  - h) Tidak menuntut hasil keputusan seleksi Pengadaan Jasa Tenaga Ahli Penyelenggaraan Sekretariat TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta.
7. Fotokopi Ijazah sesuai kualifikasi.
  8. Foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna biru (maksimal foto 6 bulan terakhir).
  9. Daftar Riwayat Hidup/*Curriculum Vitae* (CV).
  10. Tidak sedang dalam ikatan kontrak kerja/jasa konsultansi dengan instansi lain (baik pemerintah, swasta, dan/atau lembaga lainnya).
  11. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter pada fasilitas kesehatan milik pemerintah.
  12. Melampirkan referensi kerja ditempat kerja sebelumnya dan nomor telepon pemberi kerja sebelumnya yang dapat dihubungi.
  13. Memiliki peralatan kerja sendiri yang diperlukan untuk menjalankan tugas (antara lain seperti laptop, gawai dll.).
  14. Bersedia bekerja penuh waktu (*fulltime*).
  15. Memiliki bukti kepemilikan akun Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP LKPP) yang ditunjukkan dengan *screenshot* akun (apabila belum memiliki wajib membuat akun SIKaP pada saat proses pengadaan berlangsung).

## **II. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS**

### **1. Tenaga Ahli Pengelola Website SDGs**

- a) Pendidikan: Minimum pendidikan Sarjana (S1) pada Bidang Teknologi Informasi atau bidang lainnya yang terkait.
- b) Memiliki minimum pengalaman 3 (tiga) tahun dalam posisi website desainer atau yang sejenis.

- c) Memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek (website atau sistem informasi) yang sudah berjalan.
- d) Menguasai *software-software* dasar dan update terhadap *software-software* baru yang menunjang pekerjaan website desain.
- e) Memiliki pengalaman yang baik dalam bekerjasama dengan pemerintah dan membangun jaringan bersama Perangkat Daerah maupun lembaga donor.
- f) Memiliki pemahaman yang baik terkait TPB/SDGs.
- g) Cakap dalam Bahasa Inggris (ditunjukkan dengan skor TOEFL ITP/PBT yang masih berlaku dengan minimal skor TOEFL adalah 500 yang diterbitkan dari lembaga internasional atau lembaga bahasa perguruan tinggi atau lembaga pendidikan Bahasa Inggris).
- h) Memiliki kemampuan interpersonal yang kuat dan mampu bekerja secara efektif dalam tim.
- i) Mampu bekerja secara efektif dan efisien serta berkomitmen dalam memenuhi tenggat waktu yang ketat.
- j) Berkomitmen untuk menyelesaikan kontrak sesuai tenggat waktu yang disepakati.

## **2. Tenaga Ahli Pengolah Data SDGs**

- a) Pendidikan minimal Sarjana (S1) pada bidang Statistik, Matematika, Teknik atau bidang lainnya yang relevan.
- b) Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam mengelola dan manajemen data.
- c) Mampu mengolah data secara efisien dan akurat menggunakan perangkat lunak statistik (misalnya, R, Python, SPSS) dan aplikasi Microsoft Office (Microsoft Excel, Powerpoint, Word, dll.) serta mampu beradaptasi dengan perangkat lunak baru yang menunjang pekerjaan. Kemampuan dalam menggunakan aplikasi lainnya yang akan menunjang pekerjaan, lebih diutamakan.
- d) Memiliki kemampuan koordinasi efektif dengan para pemangku kepentingan serta pengalaman baik dalam kerjasama dan membangun jaringan dengan pemerintah, Perangkat Daerah, dan lembaga donor.
- e) Memiliki pemahaman yang baik terkait TPB/SDGs.
- f) Memiliki kemampuan Bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan dengan melampirkan sertifikat bahasa inggris dengan skor minimal TOEFL ITP 500, TOEFL iBT 61, PTE academic 50, IELTS 6,0, atau sertifikat lain yang nilainya ekuivalen dan masih berlaku.

- g) Memiliki kemampuan interpersonal yang kuat dan mampu bekerja secara efektif dalam tim.
- h) Mampu bekerja secara efektif dan efisien serta berkomitmen dalam memenuhi tenggat waktu yang ketat.
- i) Berkomitmen untuk menyelesaikan kontrak sesuai tenggat waktu yang disepakati.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan data lamaran sesuai dengan Persyaratan Administrasi/Kualifikasi dimaksud melalui email [prid@jakarta.go.id](mailto:prid@jakarta.go.id) dan melengkapi formulir pada tautan [bit.ly/RekrutmenTASDGs2026](https://bit.ly/RekrutmenTASDGs2026) mulai tanggal 9-14 Desember 2025 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

### IV. JADWAL SELEKSI

Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan di Jakarta, penjadwalan untuk seluruh tahapan seleksi adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Tanggal
1.	Pengumuman Pengadaan	9 Januari 2026
2.	Pendaftaran	9 –14 Januari 2026
3.	Seleksi Administrasi	15 Januari 2026
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 Januari 2026
5.	Seleksi <i>Interview</i>	19-20 Januari 2026
6.	Pengumuman Hasil Seleksi <i>Interview</i>	22 Januari 2026

### V. LAIN-LAIN

1. Bagi Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang ditetapkan dikarenakan alasan tertentu, dapat menyampaikan kepada PPK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) minimum H-1 disertai alasan ketidakhadirannya. Bagi Pelamar yang tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dinyatakan gugur.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi, maka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yang akan diberitahukan melalui surel.

3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir atau pada masa kontrak diketahui terdapat keterangan Pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka PPK berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
4. Keputusan PPK dalam proses pengadaan ini tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 8 Januari 2026  
Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

  
Andhika Aje

NIP 197512132010011007

Lampiran: Pengumuman Pejabat Pembuat  
Komitmen Pusat Riset dan Inovasi  
Daerah Bappeda Provinsi DKI  
Jakarta

Nomor : 20 /PN.01.02

Tanggal : 8 Januari 2026

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

No. Identitas :

Alamat :

Pekerjaan :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka Pengadaan Jasa [diisi dengan formasi Tenaga Ahli yang dituju] pada Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Provinsi DKI Jakarta pada dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Akan melaporkan kepada PA/KPAJAPIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, ..... 2026

Nama

## FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
No. Identitas :  
Alamat :  
Telepon/Fax :  
Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak.
2. Saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana.
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan pihak lain yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
5. Saya tidak pernah/sedang/dalam proses dikenakan sanksi Daftar Hitam.
6. Data – data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut:

### A. Data Administrasi

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. AlamatRumah :  
No. Telepon :
4. AlamatKantor :  
No. Telepon :
5. Email :
6. NomorIdentitas :

B. Data Pekerjaan yang Telah/Sedang Dilaksanakan  
(contoh)

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat; Telepon		Nomor; Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana)	Prestasi Kerja (%)
1	Tenaga Ahli Data Entry Pengelolaan Kearsipan	Mengelola Arsip Dinamis Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital secara efisien, efektif, dan sistematis . Adapun ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis Bappeda yang akan dikerjakan meliputi pemeliharaan, serta penyusutan arsip.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Jalan Medan Merdeka Selatan No 8-9, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110; 021-3822261	Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta	12/- 077.922; 04 Januari 2021	Rp. 69.720.000,-	12/- 077.922	80%



Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, .....2026

Materai10.000

Nama

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah/sedang/dalam proses dikenakan sanksi daftar hitam.
2. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak terkait.
3. Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana.
4. Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara atau Calon Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
5. Bersedia ditugaskan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
6. Tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia/terdapat perubahan anggaran dalam DPA Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025/proses pengadaan dibatalkan.
7. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
8. Tidak menuntut hasil keputusan seleksi Pengadaan Jasa Tenaga Ahli Penyelenggaraan Sekretariat TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta
9. Berkomitmen untuk menyelesaikan kontrak sesuai tenggat waktu yang disepakati.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, ..... 2026

Materai 10.000

Nama